

ABSTRAK



MERCU BUANA

STRATEGI KOMUNIKASI DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DALAM MENSOSIALISASIKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk membahas strategi komunikasi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik adalah pendekatan Penelitian Kualitatif. Penentuan Informan Penelitian sebanyak 3 orang menggunakan *snow ball technique*, pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara, pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan dan untuk memahasi obyek dan lokasi penelitian dilakukan observasi. Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Strategi komunikasi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik dalam mempromosikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kepada Badan-Badan Publik dilakukan dengan mengadakan kerjasama kelembagaan dengan berbagai organisasi media antara lain: (1) Kerjasama kelembagaan dengan KPI, Dewan Pers dan LKBN Antara; (2) Penyiapan lembaga pengelola dan pelayan informasi publik di lingkungan instansi pemerintah atau organisasi publik; (3) Pembentukan Komisi Informasi Pusat dan Daerah; (4) Peningkatan kapasitas SDM bidang Komunikasi, Layanan Informasi dan Penyiaran (media); dan (5) Penguatan peran kelembagaan komunikasi sosial.

Strategi komunikasi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik dalam menyosialisasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat dilakukan dengan mengangkat dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi, fasilitas pendukung seperti layanan akses internet gratis, petugas pelaksana layanan informasi, instrumen transaksi, produk pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi.



ABSTRACT

DIRECTORATE COMMUNICATION STRATEGY INFORMATION GENERAL AND PUBLIC COMMUNICATION IN MENYOSIALISASIKAN NUMBER LAW 14 YEARS 2008 ABOUT PUBLIC INFORMATION OPENNESSES

Observational approaching that is utilized to work through directorate communication strategy Infomasi's General and Public Communication is kualitatif's Observational approaching. Observational Informan determination as much 3 person utilize snow ball technique , data collecting primarying to utilize interview tech, data collecting secondarying to utilize studi bibliography and for memahasi object and research location done by observation. Acquired conclusion of observational result study is as follows:

Directorate communication strategy Information General and Public Communication in promote Public Information openness Law to Public Bodies to be done by arrange institute collaboration with various organisational media for example: (1) institutional collaborations with KPI, Board of Mass Media and LKBN Among; (2) managing institute Preparations and public information servants at environmentally commanding institution or organisational public; (3) Information Commission Formings Center and Region; (4) SDM'S capacity Step-up Communication areas. Information and Broadcasting service (media); and (5) institutional role Supports social communications.

Directorate communication strategy Information General and Public Communication in menyosialisasikan Public Information openness Law to society did by lifts and establish Information Organizer Official and Documentation (PPID). Base Communication Minister decision and Informatika Is Number 117 Years 2010 about Information Organizer Organizations and Documentation where one of Managing Official tasks Informations and Documentation (PPID) providing public information access for suppliant information. Concerning with that task, PPID establishes information service default at environmentally Communication ministry and Informatika in order to public ministering management with provides medium, prasarana, facility as desk information service, supporting facility as service of free internet access, executor officer services information, transactions instrument, ministering product, and establishes information service time.